Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3084-3094

MASLAHAH SOSIAL DAN DISTORSI DALAM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS: ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH

GIYAN SUMANTRI
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
sumantrigiyan@gmail.com

Abstrak
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan publik yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi anak sekolah sekaligus memperkuat kesejahteraan sosial masyarakat. Kebijakan ini memiliki dimensi strategis dalam pembangunan nasional karena berkaitan dengan peningkatan kesehatan, kualitas pendidikan, serta pengurangan beban ekonomi keluarga. Namun, implementasi program MBG juga menimbulkan dinamika sosial-ekonomi di tingkat lokal, seperti potensi kenaikan harga bahan pangan, gangguan distribusi pasar, serta berkurangnya aktivitas ekonomi pedagang kecil di sekitar sekolah. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan ini tidak hanya penting dari sudut pandang ekonomi dan administrasi publik, tetapi juga dari perspektif etika dan nilai dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-konseptual yang memadukan analisis literatur maqāṣid klasik dan kontemporer dengan data empiris dari laporan kebijakan dan pemberitaan terkait implementasi MBG. Hasil analisis menunjukkan bahwa program MBG pada dasarnya mengandung kemaslahatan sosial yang signifikan, terutama dalam mendukung perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Namun demikian, beberapa dampak ekonomi seperti distorsi pasar dan ketimpangan distribusi menunjukkan adanya potensi *mafsadah* yang perlu diantisipasi. Oleh karena itu, keseimbangan antara *maslahah* dan *mafsadah* harus dijaga melalui penguatan tata kelola kebijakan, stabilisasi distribusi pangan, serta pelibatan pelaku ekonomi lokal agar tujuan kesejahteraan publik dapat tercapai secara adil dan berkelanjutan.
Kata Kunci : *Makan Bergizi Gratis, kebijakan publik, maqāṣid al-syarī'ah, maslahah sosial, distorsi pasar.*

Abstract
The Free Nutritious Meal Program (MBG) is a public policy aimed at improving the quality of human resources by fulfilling the nutritional needs of schoolchildren while simultaneously strengthening the social welfare of the community. This policy has a strategic dimension for national development because it is related to improving health, the quality of education, and reducing the economic burden on families. However, the implementation of the MBG program also creates socio-economic dynamics at the local level, such as potential increases in food prices, disruptions in market distribution, and reduced economic activity for small traders around schools. Therefore, evaluating this policy is important not only from an

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3084-3094

economic and public administration perspective, but also from an ethical and value perspective within the framework of the maqāṣid al-Shari'ah (obligatory principles of Islamic law). This research uses a qualitative approach with a normative-conceptual method that combines analysis of classical and contemporary maqāṣid literature with empirical data from policy reports and news reports related to the implementation of the MBG. The analysis shows that the MBG program essentially contains significant social benefits, particularly in supporting the protection of life (ḥifẓ al-nafs), intellect (ḥifẓ al-'aql), descendants (ḥifẓ al-nasl), and wealth (ḥifẓ al-māl). However, several economic impacts, such as market distortions and distributional inequality, indicate potential harms that need to be anticipated. Therefore, the balance between benefits and harms must be maintained through strengthening policy governance, stabilizing food distribution, and involving local economic actors so that public welfare goals can be achieved fairly and sustainably.
***Keywords**: Free Nutritious Meals, public policy, maqāṣid al-syarī'ah, social benefits, market distortion.*

Pendahuluan

Pemenuhan gizi merupakan salah satu elemen fundamental dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Gizi yang baik sejak masa dini berkontribusi langsung terhadap perkembangan fisik, perkembangan kognitif, produktivitas, serta kapasitas belajar anak dan generasi muda. Anak-anak yang tidak memperoleh gizi seimbang cenderung memiliki daya tahan tubuh rendah, risiko kesehatan yang lebih tinggi, dan hasil belajar yang kurang optimal, yang pada akhirnya akan memengaruhi daya saing suatu bangsa di masa depan. Dalam konteks pembangunan nasional, negara-negara berkembang termasuk Indonesia berfokus pada program-program intervensi gizi sebagai investasi jangka panjang untuk menghadapi era bonus demografi dan meningkatkan kualitas SDM.[1]

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah Indonesia pada Januari 2025 merupakan salah satu kebijakan kesejahteraan publik yang dirancang untuk menjawab tantangan pemenuhan gizi masyarakat, terutama pada anak usia sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program ini memiliki tujuan strategis untuk meningkatkan kesehatan, memperbaiki kemampuan belajar, dan mendorong produktivitas generasi muda dalam rangka mewujudkan *Indonesia Emas 2045* sebagai visi pembangunan nasional jangka panjang.[2] Dirancang sebagai kebijakan sosial yang komprehensif, MBG tidak hanya fokus pada pemberian makanan bergizi, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Namun demikian, implementasi MBG juga memunculkan berbagai dinamika di lapangan, terutama terkait dengan konsekuensi ekonomi yang tidak terduga. Sejumlah laporan media dan pemantauan awal menunjukkan adanya fenomena

[1] Kemenkeu RI, *Makan Bergizi Gratis: Kebijakan Sosial atau Stimulus Ekonomi Baru bagi NTB*, 2026. https://www.djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/ntb/id/data-publikasi/artikel/3184-makan-bergizi-gratis-kebijakan-sosial-atau-stimulus-ekonomi-baru-bagi-ntb.html

[2] Bappenas & UNICEF, *Press Release: National Centre of Excellence for the Free Nutritious Meals Programme*, 2025. Ministry of PPN/Bappenas, BGN, IPB University and UNICEF Launch National Centre of Excellence for the Free Nutritious Meals Programme

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3084-3094

kenaikan harga bahan pangan di pasar akibat permintaan besar untuk penyediaan menu bergizi kepada jutaan penerima manfaat, serta gangguan terhadap distribusi bahan pokok. Dalam beberapa kasus, permintaan massal dari dapur MBG berkontribusi pada tekanan harga di pasar tradisional, sementara pedagang kecil merasakan dampaknya secara langsung karena persaingan pembelian dengan pembelian pemerintah dalam jumlah besar.[3] Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kebijakan ini memengaruhi mekanisme pasar dan keadilan distribusi pangan pada level masyarakat lokal.

Selain itu, laporan lain juga menunjukkan terdapat masalah dalam kualitas pelaksanaan MBG, seperti kejadian keracunan makanan anak dan masalah sanitasi dapur program yang tercatat di beberapa daerah, sehingga menimbulkan kritik dan tuntutan evaluasi terhadap tata kelola kebijakan ini.[4] Kasus-kasus seperti ini memunculkan kekhawatiran bahwa meskipun tujuan program bertujuan maslahah sosial untuk kesehatan dan kesejahteraan publik, terdapat risiko mafsadah yang perlu dikendalikan melalui pengawasan yang lebih ketat.

Karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan yang tidak hanya berdasarkan indikator kuantitatif seperti jumlah penerima manfaat atau alokasi anggaran, tetapi juga melalui suatu kerangka nilai yang mempertimbangkan kemaslahatan sosial, keadilan ekonomi, serta dampak kebijakan terhadap sistem kehidupan masyarakat. Salah satu kerangka nilai yang sangat relevan untuk digunakan dalam evaluasi seperti ini adalah maqāṣid al-syarī‘ah, yaitu tujuan syariat yang berfokus pada perlindungan kemanusiaan secara menyeluruh, termasuk perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), harta (*ḥifẓ al-māl*), dan agama (*ḥifẓ al-dīn*). Pendekatan maqāṣid modern melalui perspektif sistem dari Jasser Auda memberikan fondasi analitik yang mampu mengevaluasi kebijakan publik secara holistik, terutama ketika kebijakan tersebut memiliki implikasi multidimensional pada masyarakat.[5]

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji maslahah sosial dan potensi distorsi pasar dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis melalui lensa maqāṣid al-syarī‘ah, mengidentifikasi keseimbangan antara kemanfaatan dan kemudharatan kebijakan tersebut, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan sosial dalam konteks pembangunan Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-konseptual. Jenis penelitian ini dipilih karena fokus kajian bukan pada pengukuran statistik, melainkan pada analisis makna, nilai, dan konstruksi normatif kebijakan dalam perspektif hukum Islam dan kebijakan publik.[6] Pendekatan normatif-

[3] Kompas.id, *Urgency of Evaluation of the Implementation of the Free Nutritious Meal Program*, 2025. Urgency of Evaluation of the Implementation of the Free Nutritious Meal Program

[4] Reuters (2025), laporan tentang insiden keracunan terkait program MBG. Indonesia agency says lack of oversight in free meal programme led to food poisoning cases | Reuters

[5] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 2008, hal. 50-67.

[6] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 6-8.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3084-3094

konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *maslahah* dalam maqāṣid al-syarī'ah serta relevansinya terhadap kebijakan publik kontemporer, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).[7] Dalam kerangka ini, penelitian mengintegrasikan dua pendekatan utama: pertama, pendekatan maqāṣid al-syarī'ah sebagaimana dirumuskan dalam tradisi klasik oleh Abu Ishaq Al-Shatibi dan dikembangkan secara sistemik oleh Jasser Auda, kedua pendekatan kebijakan publik yang memandang kebijakan sebagai instrumen negara dalam mendistribusikan kesejahteraan dan mengelola dampak sosial-ekonomi masyarakat.

Sumber data penelitian terdiri atas dua kategori. Pertama, data empiris berupa berita nasional, laporan kebijakan pemerintah, serta fenomena sosial yang muncul dalam implementasi MBG, termasuk isu kenaikan harga bahan pangan dan gangguan distribusi pasar yang terdokumentasi dalam media dan laporan kebijakan resmi. Kedua, data teoretis berupa literatur maqāṣid klasik dan kontemporer, termasuk karya Abu Ishaq al-Shatibi dalam *al-Muwāfaqāt* serta pendekatan sistem maqāṣid dari Jasser Auda. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif terhadap fenomena sosial-ekonomi MBG, serta analisis evaluatif berbasis maqāṣid dengan kerangka maslahah mafsadah untuk menilai keseimbangan manfaat dan potensi mudarat kebijakan.

Pembahasan

Maslahah Sosial Program MBG dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, kebijakan publik dinilai berdasarkan kemampuannya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan pada lima perlindungan pokok (al-ḍarūriyyāt al-khams). Konsep ini secara sistematis dirumuskan oleh Abu Ishaq al-Shatibi dalam *al-Muwāfaqāt*, yang menegaskan bahwa tujuan syariat adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai fondasi keberlangsungan kehidupan manusia.[8] Dalam pengembangan kontemporer, Jasser Auda menempatkan maqāṣid sebagai pendekatan sistem yang menilai kebijakan secara holistik dan multidimensional, tidak semata-mata legal-formal, melainkan substantif dan kontekstual.[9] Dengan kerangka tersebut, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dianalisis sebagai instrumen negara yang berpotensi merealisasikan *maslahah 'āmmah* (kemaslahatan publik) dalam dimensi sosial dan pembangunan manusia.

1. Perlindungan Jiwa (Ḥifẓ al-Nafs): Peningkatan Gizi dan Kesehatan Anak

Perlindungan jiwa merupakan prioritas utama dalam hierarki maqāṣid. Menurut al-Shatibi, penjagaan jiwa mencakup pemenuhan kebutuhan dasar yang menjamin keberlangsungan hidup manusia, termasuk makanan yang layak dan bergizi.[10] Dalam konteks kebijakan publik modern, pemenuhan gizi anak merupakan bagian dari strategi perlindungan jiwa karena berkaitan langsung dengan kesehatan, pertumbuhan fisik, serta pencegahan penyakit kronis dan stunting.

---

[7] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2019), hlm. 57-60.

[8] Abu Ishaq al-Shatibi, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.), hlm. 8-12.

[9] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 50-67.

[10] Al-Shatibi, *al-Muwāfaqāt*, Jilid II, hlm. 10-11.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3084-3094

Program MBG dirancang untuk menyediakan makanan bergizi kepada anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan sebagai bentuk intervensi negara terhadap persoalan gizi nasional. Laporan kerja sama antara Bappenas dan UNICEF menegaskan bahwa program makanan bergizi memiliki dampak signifikan terhadap perbaikan status gizi dan ketahanan kesehatan anak, terutama di daerah dengan tingkat kerentanan tinggi.[11] Secara empiris, berbagai studi global menunjukkan bahwa intervensi makanan sekolah mampu meningkatkan indikator kesehatan dan menurunkan risiko malnutrisi.[12] Dengan demikian, dalam perspektif ḥifẓ al-nafs, MBG merepresentasikan realisasi nyata perlindungan jiwa melalui kebijakan sosial berbasis pangan.

2. Perlindungan Akal (Ḥifẓ al-'Aql): Peningkatan Konsentrasi dan Kualitas Pembelajaran

Perlindungan akal dalam maqāṣid al-syarī'ah tidak hanya dimaknai sebagai larangan terhadap hal-hal yang merusak akal, tetapi juga sebagai upaya positif untuk mendukung perkembangan intelektual manusia.[13] Asupan gizi yang cukup terbukti secara ilmiah berkontribusi terhadap peningkatan konsentrasi, daya ingat, serta performa belajar siswa. Studi pendidikan dan kesehatan menunjukkan bahwa anak yang memperoleh sarapan dan makanan bergizi memiliki tingkat kehadiran lebih tinggi serta hasil akademik yang lebih baik dibandingkan anak yang mengalami kekurangan gizi.[14]

Dalam konteks MBG, pemberian makanan bergizi di sekolah berfungsi sebagai instrumen kebijakan yang mengintegrasikan dimensi kesehatan dan pendidikan. Upaya ini selaras dengan tujuan negara untuk meningkatkan kualitas SDM sebagai investasi jangka panjang.[15] Jika dianalisis melalui pendekatan sistem maqāṣid ala Jasser Auda, kebijakan ini tidak hanya memenuhi satu dimensi perlindungan (jiwa), tetapi juga memiliki implikasi simultan terhadap perlindungan akal melalui peningkatan kapasitas kognitif generasi muda. Oleh karena itu, MBG dapat dipahami sebagai kebijakan yang berorientasi pada pembangunan intelektual bangsa.

3. Perlindungan Keturunan (Ḥifẓ al-Nasl): Mewujudkan Generasi Sehat dan Berkualitas

Perlindungan keturunan dalam maqāṣid mencakup upaya menjaga keberlanjutan generasi yang sehat, bermoral, dan produktif. Al-Shatibi menekankan bahwa syariat bertujuan menjaga kesinambungan eksistensi manusia melalui sistem yang menjamin kualitas kehidupan generasi berikutnya. Dalam konteks modern, kualitas

---

[11] Bappenas & UNICEF, *National Centre of Excellence for the Free Nutritious Meals Programme*, Press Release, 2025. Ministry of PPN/Bappenas, BGN, IPB University and UNICEF Launch National Centre of Excellence for the Free Nutritious Meals Programme

[12] World Food Programme, *State of School Feeding Worldwide 2022* (Rome: WFP, 2022), hlm. 15-20.

[13] Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), Jilid II, hlm. 1017-1019.

[14] J. Bryan et al., "Nutrients for Cognitive Development in School-Aged Children," *Nutrition Reviews*, Vol. 62, No. 8 (2004), hlm. 295-306.

[15] Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus* (Yogyakarta: CAPS, 2014), hlm. 42-45.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3084-3094

generasi sangat ditentukan oleh status gizi, kesehatan ibu dan anak, serta akses terhadap layanan dasar.

Program MBG, dengan cakupan penerima manfaat yang meliputi anak usia sekolah dan ibu hamil, berkontribusi terhadap pencegahan kekurangan gizi kronis dan risiko stunting yang dapat berdampak jangka panjang terhadap kualitas generasi. Data kebijakan menunjukkan bahwa intervensi gizi sejak dini berpengaruh signifikan terhadap produktivitas dan kualitas hidup di masa depan. Dengan demikian, dalam perspektif ḥifẓ al-nasl, MBG merupakan instrumen strategis dalam membangun generasi yang lebih sehat, cerdas, dan kompetitif.

4. Perlindungan Harta (Ḥifẓ al-Māl): Pengurangan Beban Ekonomi Keluarga

Dimensi perlindungan harta dalam maqāṣid tidak hanya menyangkut larangan perampasan atau ketidakadilan ekonomi, tetapi juga menjamin distribusi sumber daya yang adil dan proporsional.[16] Dalam konteks keluarga miskin dan rentan, pengeluaran untuk kebutuhan pangan sering kali menjadi beban utama dalam struktur ekonomi rumah tangga. Kebijakan MBG berpotensi mengurangi beban tersebut dengan menyediakan makanan bergizi secara gratis bagi anak-anak sekolah.

Laporan kebijakan menunjukkan bahwa bantuan pangan langsung atau program makan sekolah dapat meningkatkan daya beli keluarga serta mengalihkan alokasi pengeluaran untuk kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan.[17] Dalam perspektif maqāṣid, pengurangan beban ekonomi ini termasuk bagian dari realisasi ḥifẓ al-māl karena menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga dan mencegah kemiskinan ekstrem. Namun demikian, perlindungan harta juga mensyaratkan agar kebijakan tidak menimbulkan distorsi pasar yang merugikan pelaku usaha kecil, aspek ini menjadi bagian penting dalam penelitian sebagai evaluasi keseimbangan antara maslahah dan mafsadah.

Distorsi Pasar dan Dampak Ekonomi Program MBG

Dalam perspektif ekonomi publik, intervensi negara dalam skala besar melalui kebijakan subsidi pangan atau program makan gratis berpotensi menimbulkan efek eksternal (*externalities*) dan distorsi pasar apabila tidak disertai mekanisme distribusi yang terintegrasi dengan sistem pasar lokal.[18] Dalam konteks Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dinamika tersebut mulai terlihat pada fase implementasi awal di beberapa daerah. Sejumlah laporan media mencatat adanya kenaikan harga bahan pangan tertentu, khususnya sayur-mayur dan bumbu dapur, yang dipicu oleh peningkatan permintaan dalam jumlah besar untuk kebutuhan dapur MBG.[19] Fenomena ini selaras dengan teori ekonomi permintaan-penawaran yang menyatakan bahwa lonjakan permintaan tanpa penyesuaian pasokan akan mendorong kenaikan harga di tingkat pasar. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah,

[16] Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid II, hlm. 1025.

[17] World Bank, *The Impact of School Feeding Programs on Household Welfare*, Policy Report (Washington DC, 2019), hlm. 12-18.

[18] N. Gregory Mankiw, *Principles of Economics* (Boston: Cengage Learning, 2018), hlm. 65-72.

[19] “Dampak Program MBG, Harga Sayur dan Bumbu Dapur di Pasaran Jadi Naik,” Lingkar.co, 2025. https://lingkar.co/dampak-program-mbg-harga-sayur-dan-bumbu-dapur-di-pasaran-jadi-naik/

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3084-3094

kondisi ini perlu dievaluasi karena berpotensi menyentuh dimensi ḥifẓ al-māl (perlindungan harta), terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak kenaikan harga kebutuhan pokok.

Lebih lanjut, gangguan distribusi pasar juga dilaporkan terjadi di beberapa wilayah akibat perubahan pola pembelian bahan pangan dalam skala besar oleh penyedia MBG. Laporan pemberitaan nasional menunjukkan adanya keluhan dari masyarakat terkait pasokan bahan pokok yang sempat tersendat karena distribusi terfokus pada dapur program.[20] Dalam kerangka kebijakan publik, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai *implementation gap*, yakni ketidakseimbangan antara desain kebijakan dan kapasitas sistem distribusi riil di lapangan.[21] Jika tidak dikelola secara adaptif, situasi ini dapat menciptakan ketimpangan akses terhadap bahan pangan antara penerima manfaat langsung MBG dan masyarakat umum.

Dampak lain yang muncul adalah berkurangnya jumlah pelanggan pada pedagang kecil atau warung makan di sekitar sekolah. Beberapa laporan daerah menyebutkan bahwa sejak MBG berjalan, sebagian pedagang mengalami penurunan omzet karena siswa tidak lagi membeli makanan secara mandiri.[22] Secara mikroekonomi, hal ini menunjukkan terjadinya pergeseran konsumsi yang memengaruhi pelaku usaha informal. Dalam perspektif maqāṣid, kondisi ini berpotensi menimbulkan mafsadah pada dimensi ḥifẓ al-māl bagi pelaku usaha kecil apabila kebijakan tidak diiringi skema pemberdayaan atau integrasi mereka dalam rantai pasok program. Pendekatan sistem maqāṣid sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda menekankan pentingnya analisis multidimensi dan interkonektivitas kebijakan agar tidak menghasilkan dampak negatif pada subsistem sosial-ekonomi lainnya.[23]

Selain itu, muncul pula indikasi ketimpangan perputaran ekonomi akibat sentralisasi pengadaan bahan pangan pada mitra atau pemasok tertentu. Dalam teori kebijakan ekonomi, konsentrasi distribusi pada aktor tertentu berisiko menciptakan eksklusivitas akses dan mempersempit ruang partisipasi pelaku ekonomi lokal.[24] Apabila pengadaan tidak melibatkan petani dan pedagang kecil secara proporsional, maka manfaat ekonomi program dapat terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja. Dalam perspektif maqāṣid klasik yang dirumuskan oleh Abu Ishaq al-Shatibi, kemaslahatan publik harus bersifat inklusif dan tidak boleh menimbulkan kemudaratan bagi kelompok lain secara tidak proporsional.[25] Oleh karena itu,

---

[20] "Efek Kejutan MBG Ancam Pasokan Dapur Warga Jawa Barat," MSN Indonesia, 2025. https://www.msn.com/id-id/berita/other/efek-kejutan-mbg-ancam-pasokan-dapur-warga-jawa-barat-disperindag-jabar-akui-distribusi-bahan-pokok-macet/ar-AA1OkFYb

[21] Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus* (Yogyakarta: CAPS, 2014), hlm. 148-152.

[22] "Efek Samping MBG di Blora: Anak Kenyang, Pedagang Tersisih," Suarabanyuurip.com, 2025. https://www.msn.com/id-id/berita/other/efek-kejutan-mbg-ancam-pasokan-dapur-warga-jawa-barat-disperindag-jabar-akui-distribusi-bahan-pokok-macet/ar-AA1OkFYb

[23] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 93-101.

[24] Joseph E. Stiglitz, *Economics of the Public Sector* (New York: W.W. Norton, 2000), hlm. 77-81.

[25] Abu Ishaq al-Shatibi, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.), hlm. 20-23.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3084-3094

distorsi pasar yang terjadi dalam implementasi MBG menjadi titik kritis evaluasi untuk memastikan keseimbangan antara maslahah sosial dan perlindungan keadilan ekonomi.

Dengan demikian, meskipun MBG memiliki orientasi kemaslahatan sosial yang kuat, dampak ekonomi yang muncul menunjukkan perlunya penguatan tata kelola distribusi, pengawasan harga, serta integrasi pelaku ekonomi lokal dalam sistem pengadaan. Evaluasi berbasis maqāṣid menuntut agar kebijakan publik tidak hanya dinilai dari tujuan idealnya, tetapi juga dari implikasi riilnya terhadap keseimbangan sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

Analisis Keseimbangan Maslahah dan Mafsadah dalam Program MBG

Dalam tradisi fikih Islam, keseimbangan antara kemaslahatan dan kemudharatan menjadi prinsip fundamental dalam penetapan hukum maupun kebijakan. Salah satu kaidah fiqhiyyah yang paling relevan dalam konteks ini adalah: دَرْءُ ٱلْمَفاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ (*dar' al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*), yang berarti "menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan."[26] Kaidah ini menegaskan bahwa apabila suatu kebijakan mengandung dua konsekuensi sekaligus yaitu manfaat dan mudarat, maka pencegahan mudarat harus menjadi prioritas utama sebelum optimalisasi manfaat dilakukan. Dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, sebagaimana dirumuskan oleh Abu Ishaq al-Shatibi, kemaslahatan sejati adalah yang bersifat komprehensif (*kulliyyah*) dan tidak menghasilkan kerusakan pada aspek fundamental kehidupan manusia.[27] Sementara itu, pendekatan sistem yang dikembangkan oleh Jasser Auda menekankan pentingnya analisis multidimensi dan keterkaitan antar-subsistem sosial dalam mengevaluasi kebijakan publik modern.[28] Dengan demikian, evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus mempertimbangkan tidak hanya tujuan idealnya (peningkatan gizi dan kesejahteraan), tetapi juga dampak ekonomi dan sosial yang menyertainya. Secara substantif, manfaat sosial MBG dalam perspektif maqāṣid cukup signifikan: perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) melalui pemenuhan gizi anak, perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*) melalui peningkatan konsentrasi belajar, perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) melalui pembangunan generasi sehat, serta pengurangan beban ekonomi keluarga (*ḥifẓ al-māl*).[29] Berbagai laporan kebijakan dan kerja sama antara Bappenas dan UNICEF menunjukkan bahwa program makan bergizi memiliki dampak positif terhadap kualitas kesehatan dan kesiapan belajar anak.[30] Namun demikian, implementasi awal MBG juga memperlihatkan indikasi mafsadah dalam bentuk kenaikan harga bahan pangan dan gangguan distribusi pasar di beberapa

---

[26] Jalal al-Din al-Suyuti, *Al-Ashbah wa al-Nazā'ir* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), hlm. 87-89.

[27] Abu Ishaq al-Shatibi, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.), hlm. 20-23.

[28] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 93-101.

[29] Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), Jilid II, hlm. 1017-1025.

[30] Bappenas & UNICEF, *National Centre of Excellence for the Free Nutritious Meals Programme*, 2025. Ministry of PPN/Bappenas, BGN, IPB University and UNICEF Launch National Centre of Excellence for the Free Nutritious Meals Programme

daerah, sebagaimana diberitakan oleh Lingkar.co dan Suarabanyuurip.com.[31] Dampak tersebut berpotensi mengganggu perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) bagi masyarakat luas, terutama pedagang kecil dan konsumen berpendapatan rendah. Oleh karena itu, pertanyaan krusial dalam analisis maqāṣid adalah apakah manfaat sosial jangka panjang lebih dominan daripada potensi kerusakan ekonomi jangka pendek.

Berdasarkan pendekatan evaluatif maqāṣid, suatu kebijakan dapat dinilai maslahat apabila (1) manfaatnya bersifat lebih luas daripada kerugiannya, (2) kerugiannya dapat diminimalisasi melalui regulasi dan pengawasan, serta (3) tidak merusak struktur keadilan sosial secara permanen. Jika distorsi pasar yang terjadi dalam MBG bersifat temporer dan dapat dikendalikan melalui kebijakan stabilisasi harga, transparansi distribusi, serta pelibatan pelaku usaha lokal, maka manfaat program dalam pembangunan SDM berpotensi lebih dominan dibandingkan mafsadahnya. Sebaliknya, apabila distorsi tersebut dibiarkan dan menciptakan ketimpangan struktural, maka kebijakan dapat menyimpang dari tujuan maqāṣid yang sejati. Dalam kerangka ini, prinsip *al-maslahah al-'ammah muqaddamah 'alā al-maslahah al-khāṣṣah* (kepentingan umum didahulukan atas kepentingan individual) juga harus dibaca secara proporsional, yakni tidak boleh mengorbankan kelompok rentan secara tidak adil.

Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan berbasis maqāṣid menuntut penguatan prinsip keadilan distribusi dalam implementasi MBG. Pertama, pemerintah perlu memastikan integrasi petani lokal dan pedagang kecil dalam rantai pasok program agar perputaran ekonomi bersifat inklusif dan tidak terpusat pada kelompok tertentu. Kedua, diperlukan mekanisme pengawasan harga dan koordinasi distribusi lintas sektor untuk mencegah kelangkaan bahan pangan di pasar umum. Ketiga, evaluasi berkala berbasis data empiris harus dilakukan untuk mengukur keseimbangan manfaat dan mudarat secara objektif. Prinsip ini selaras dengan teori kebijakan publik yang menekankan pentingnya *policy feedback* dan adaptasi regulatif dalam tahap implementasi.[32] Dengan pendekatan demikian, MBG dapat tetap menjadi instrumen maslahah sosial yang kuat tanpa menimbulkan mafsadah ekonomi yang meluas, sehingga selaras dengan tujuan maqāṣid al-syarī'ah dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan kolektif.

Kesimpulan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan publik yang memiliki orientasi kuat pada peningkatan kesejahteraan sosial dan pembangunan sumber daya manusia. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, program ini pada dasarnya merepresentasikan upaya negara dalam mewujudkan kemaslahatan publik (*maslahah 'āmmah*), khususnya melalui perlindungan terhadap empat aspek utama kehidupan manusia, yaitu perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) melalui peningkatan gizi dan kesehatan anak, perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*) melalui peningkatan konsentrasi dan kualitas pembelajaran, perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*)

[31] "Dampak Program MBG, Harga Sayur dan Bumbu Dapur di Pasaran Jadi Naik," Lingkar.co, 2025. https://lingkar.co/dampak-program-mbg-harga-sayur-dan-bumbu-dapur-di-pasaran-jadi-naik/

[32] Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus* (Yogyakarta: CAPS, 2014), hlm. 148-152.

melalui pembentukan generasi yang sehat dan produktif, serta perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) melalui pengurangan beban ekonomi keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Dengan demikian, secara normatif program MBG memiliki legitimasi yang kuat dalam kerangka maqāṣid karena selaras dengan tujuan syariat untuk mewujudkan kesejahteraan dan menjaga keberlangsungan kehidupan manusia secara komprehensif.

Namun demikian, implementasi program ini juga menunjukkan adanya dinamika sosial-ekonomi yang memerlukan evaluasi kritis, terutama terkait munculnya distorsi pasar seperti kenaikan harga bahan pangan, gangguan distribusi bahan pokok, penurunan pendapatan pedagang kecil, serta ketimpangan perputaran ekonomi pada tingkat lokal. Dalam kerangka kaidah fiqhiyyah "dar' al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ" (menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan), kebijakan publik seperti MBG harus terus dievaluasi agar manfaat sosial yang dihasilkan tetap lebih dominan dibandingkan potensi kerusakan ekonomi yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, penguatan tata kelola program melalui pengawasan distribusi, stabilisasi harga, serta integrasi pelaku ekonomi lokal dalam rantai pasok menjadi langkah penting untuk menjaga keseimbangan antara *maslahah* dan *mafsadah*. Dengan pendekatan tersebut, MBG dapat tetap berfungsi sebagai instrumen kebijakan yang tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menciptakan sistem kesejahteraan yang adil, inklusif, dan selaras dengan tujuan utama *maqāṣid al-syarī'ah*.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3084-3094

Daftar Pustaka

Abu Ishaq al-Shatibi, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.).

Bappenas & UNICEF, *National Centre of Excellence for the Free Nutritious Meals Programme*, Press Release, 2025. Ministry of PPN/Bappenas, BGN, IPB University and UNICEF Launch National Centre of Excellence for the Free Nutritious Meals Programme

Bappenas & UNICEF, *National Centre of Excellence for the Free Nutritious Meals Programme*, 2025. Ministry of PPN/Bappenas, BGN, IPB University and UNICEF Launch National Centre of Excellence for the Free Nutritious Meals Programme

Bappenas & UNICEF, *Press Release: National Centre of Excellence for the Free Nutritious Meals Programme*, 2025. Ministry of PPN/Bappenas, BGN, IPB University and UNICEF Launch National Centre of Excellence for the Free Nutritious Meals Programme

Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus* (Yogyakarta: CAPS, 2014).

Dampak Program MBG, Harga Sayur dan Bumbu Dapur di Pasaran Jadi Naik, Lingkar.co, 2025. https://lingkar.co/dampak-program-mbg-harga-sayur-dan-bumbu-dapur-di-pasaran-jadi-naik/

Efek Kejutan MBG Ancam Pasokan Dapur Warga Jawa Barat, MSN Indonesia, 2025. https://www.msn.com/id-id/berita/other/efek-kejutan-mbg-ancam-pasokan-dapur-warga-jawa-barat-disperindag-jabar-akui-distribusi-bahan-pokok-macet/ar-AA1OkFYb

Efek Samping MBG di Blora: Anak Kenyang, Pedagang Tersisih, Suarabanyuurip.com, 2025. https://www.msn.com/id-id/berita/other/efek-kejutan-mbg-ancam-pasokan-dapur-warga-jawa-barat-disperindag-jabar-akui-distribusi-bahan-pokok-macet/ar-AA1OkFYb

J. Bryan et al., "Nutrients for Cognitive Development in School-Aged Children," *Nutrition Reviews*, Vol. 62, No. 8 (2004).

Jalal al-Din al-Suyuti, *Al-Ashbah wa al-Nazā'ir* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998).

Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008).

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2019).

Joseph E. Stiglitz, *Economics of the Public Sector* (New York: W.W. Norton, 2000).

Kemenkeu RI, *Makan Bergizi Gratis: Kebijakan Sosial atau Stimulus Ekonomi Baru bagi NTB*, 2026. https://www.djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/ntb/id/data-publikasi/artikel/3184-makan-bergizi-gratis-kebijakan-sosial-atau-stimulus-ekonomi-baru-bagi-ntb.html

Kompas.id, *Urgency of Evaluation of the Implementation of the Free Nutritious Meal Program*, 2025. Urgency of Evaluation of the Implementation of the Free Nutritious Meal Program

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018).

N. Gregory Mankiw, *Principles of Economics* (Boston: Cengage Learning, 2018).

Reuters (2025), laporan tentang insiden keracunan terkait program MBG. Indonesia agency says lack of oversight in free meal programme led to food poisoning cases | Reuters

Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), Jilid II.

World Bank, *The Impact of School Feeding Programs on Household Welfare*, Policy Report (Washington DC, 2019).

World Food Programme, *State of School Feeding Worldwide 2022* (Rome: WFP, 2022).